Kepulauan Riau
bappeda

LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Kepulauan Riau









CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2025

BAB 1

PENDAHULUAN

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyususun Laporan Keuangan SKPD, sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala SKPD atas pelaksanaan APBD.

Laporan Keuangan SKPD terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Neraca;
3. Laporan Operasional;
4. Laporan Perubahan Ekuitas;
5. Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan, merupakan satu kesatuan dengan Laporan Keuangan SKPD.

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah :

1. Sarana pertanggungjawaban dari Kepala SKPD, dalam pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.
2. Memberikan informasi tentang Laporan Keuangan bagi pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Wujud akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;

2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

1. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
2. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan SKPD menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

1. Aset;
2. Kewajiban;
3. Ekuitas dana;
4. Pendapatan;
5. Belanja;

B. Periode Pelaporan Keuangan

Periode Laporan Keuangan ini adalah tahun kalender yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Transaksi yang terkait dengan Laporan Keuangan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 ini, sangat mungkin terjadi pada tahun anggaran 2025, hal tersebut tidak menjadi bagian dari Laporan Keuangan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025, namun hanya merupakan peristiwa kemudian (**Subsequent Event**) yang mempunyai hubungan/kaitan dengan Laporan Keuangan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025. Atas peristiwa/transaksi tersebut, kami menyajikan pada tahun anggaran 2025.

C. Penanggungjawab Laporan Keuangan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau

Laporan Keuangan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025, adalah tanggungjawab Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini adalah Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

D. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, mengacu pada :

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, pasal 23;
2. Undang-undang nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang nomor 15 tahun 2004, tentang Pemeriksaan Keuangan dan Tanggungjawab Pengelolaan Keuangan Negara;
5. Undang-undang nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2010, tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2023, tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.
16. Peraturan Gubernur Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.
17. Peraturan Gubernur Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.
18. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

E. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan;
B. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan;

C. Penanggungjawab Laporan Keuangan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
D. Sistematika Penulisan Laporan Keuangan

Bab II Profil SKPD
A. Sumber Daya Manusia
B. Strategi dan Arah Kebijakan
C. Program dan Kegiatan

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Tahun 2025
A. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun anggaran 2025
B. Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi Anggaran yang telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi
A. Entitas Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah
B. Asumsi Dasar Laporan Keuangan
C. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
D. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
E. Kebijakan Akuntansi Pendapatan
F. Kebijakan Akuntansi Belanja
G. Kebijakan Akuntansi Persediaan
H. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap
I. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
A. Laporan Realisasi Anggaran;
B. Neraca;
C. Laporan Operasional;
D. Laporan Perubahan Ekuitas;

Bab VI Penjelasan Atas Informasi non Keuangan

A. Bentuk Hukum dan Domisili Entitas Akuntansi

B. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas

C. Pergantian Pengguna Anggaran

Bab VII Penutup

BAB 2

PROFIL BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2025

BAB II
PROFIL BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

A. Sumber Daya Manusia

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. *Good governance* digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumber daya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan publik yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintahan di masa mendatang adalah pemerintahan yang cerdas, yang mampu menerjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparaturnya cerdas. Terkait dengan hal tersebut di atas, jumlah aparatur berdasarkan data dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Tahun 2025 (per Desember) berjumlah 125 orang. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau menyusun kebutuhan pegawai berdasarkan peta Jabatan. Maka hasil dari analisis kebutuhan pegawai negeri sipil terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional. Jabatan Pimpinan tinggi adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah. Sedangka untuk Jabatan Administrasi merupakan sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan

pembangunan. Jenjang Jabatan Administrator terdiri dari: Jabatan administrator, Jabatan pengawas dan Jabatan pelaksana. Jabatan Administrasi, khusus pada Jabatan Pelaksana. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, menyebutkan jabatan pelaksana diklasifikasikan berdasarkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja. Setiap klasifikasi Jabatan Pelaksana berisikan nomenklatur Jabatan Pelaksana. Pada tahun 2025 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau mengangkat Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada jabatan pelaksana di Tahap 1 sebanyak 39 pegawai, tahap 2 sebanyak 7 pegawai dan 1 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja paruh waktu.

Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. JF memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan Fungsional yang berada di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau adalah Jabatan Fungsional Keahlian dengan jenjangnya adalah ahli utama, ahli madya, ahli muda dan ahli pertama dan Jabatan Fungsional Keterampilan dengan jenjangnya Penyelia dan Mahir.

Berdasarkan kondisi kepegawaian Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau, maka dapat disimpulkan kondisi sumber daya aparatur yang ada perlu dioptimalkan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi pelaksanaan bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan.

Tabel 2.1

Kondisi Kepegawaian Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024-2025

No.	Jabatan	Tahun 2024			Tahun 2025*		
		Jenis Kelamin		Jumlah	Jenis Kelamin		Jumlah
		LK	PR		LK	PR	
1.	**Jab. Pimpinan Tinggi**	**0**	**1**	**1**	1	0	**1**
2.	**Jabatan Administrasi**	**5**	**2**	**7**	**5**	**2**	**7**
	Administrator	5	1		5	1	
	Pengawas	0	1		0	1	
3.	**Jabatan Fungsional**	**25**	**24**	**49**	**23**	**23**	**46**
	Utama	**1**	**1**		**1**	**1**	
	Analis Kebijakan Ahli Utama	1	1		1	1	
	Madya	**1**	**0**		**0**	**0**	
	Perencana Ahli Madya	1	0		0	0	
	Muda	**12**	**13**		**11**	**13**	
	Analis Kebijakan Ahli Muda	4	0		4	0	
	Perencana Ahli Muda	7	11		6	11	
	Analis Keu Pusat dan Daerah Ahli Muda	1	1		1	1	
	Peneliti Ahli Muda	0	1		0	1	
	Pertama	**9**	**10**		**9**	**9**	
	Analis Kebijakan Ahli Pertama	1	1		1	1	
	Perencana Ahli Pertama	8	7		8	6	
	Peneliti Ahli Pertama	0	1		0	1	
	Analis SDM Aparatur Ahli Pertama	0	1		0	1	
	Penyelia	**1**	**0**		**1**	**0**	
	Pranata Komp Penyelia	1	0		1	0	

	Mahir	**1**	**0**		**1**	**0**	
	Pranata Komp Mahir	1	0		1	0	
4	**Jabatan Pelaksana**	**12**	**10**	**22**	44	27	
	Jabatan pelaksana	12	10		**44**	**27**	
Jumlah		**42**	**37**	**79**	**73**	**52**	**125**

Ket: *) Data Per Desember 2025

Kapasitas dan kapabilitas pegawai berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Tingkat pendidikan pegawai Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau yang paling banyak adalah pendidikan S1 sebanyak 65 orang (22,00%) dan S2 sebanyak 23 orang (18,4%). Tingkat pendidikan bagian terbesar dari pegawai yang relatif tinggi ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan.

Tabel 2.2

Kondisi Kepegawaian Menurut Jenjang Pendidikan Terakhir dan Jabatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024-2025

No.	Jenjang Pendidikan Terakhir	Tahun 2024					Tahun 2025				
		Jabatan				JML	Jabatan				JML
		JPT	JA	JF	JP		JPT	JA	JF	JP	
1.	S3	0	0	1	0	1	1	0	1	0	2
2.	S2	1	5	13	1	20	0	6	13	4	23
3.	S1	0	2	33	14	49	0	1	29	35	65
4.	D4	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4
5.	D3	0	0	2	3	5	0	0	2	6	6
6.	SMA	0	0	0	4	4	0	0	0	23	23
Jumlah		1	7	49	22	79	1	7	46	71	125

Ket: *) Data Per 31 Desember 2025

Ketersediaan SDM Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau saat ini masih kekurangan staf dengan kompetensi dibidang teknologi informatika sehingga dalam memenuhi kebutuhan SDM tersebut diisi dengan Tenaga Kontrak, namun kompetensi juga masih belum sesuai dengan harapan. Penyelenggaraan recruitment/ penambahan ASN belum dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, sehingga dalam menunjang penyelenggaraan kinerja urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan perlu adanya bimbingan teknis dalam peningkatan kompetensi SDM, serta kerjasama dengan perguruan tinggi maupun konsultan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau.

B. Strategi dan Arah Kebijakan

1. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis

Perumusan tujuan dan sasaran Bappeda Provinsi Kepulauan Riau dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2025–2029 dilakukan secara terstruktur dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau. Tujuan dan sasaran Bappeda dirancang sebagai turunan langsung dari visi, misi, serta arah pembangunan yang tertuang dalam RPJMD, dengan memperhatikan hasil (*outcome*) program pembangunan yang ditargetkan.

Proses perumusannya juga mempertimbangkan ketentuan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang berlaku sesuai tugas pokok dan fungsi Bappeda dalam mendukung perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, serta inovasi daerah. Dengan pendekatan ini, arah kebijakan kelembagaan dapat disusun secara terpadu, terukur, dan akuntabel, guna memperkuat pencapaian sasaran strategis pembangunan daerah maupun mendukung target pembangunan nasional secara sinergis.

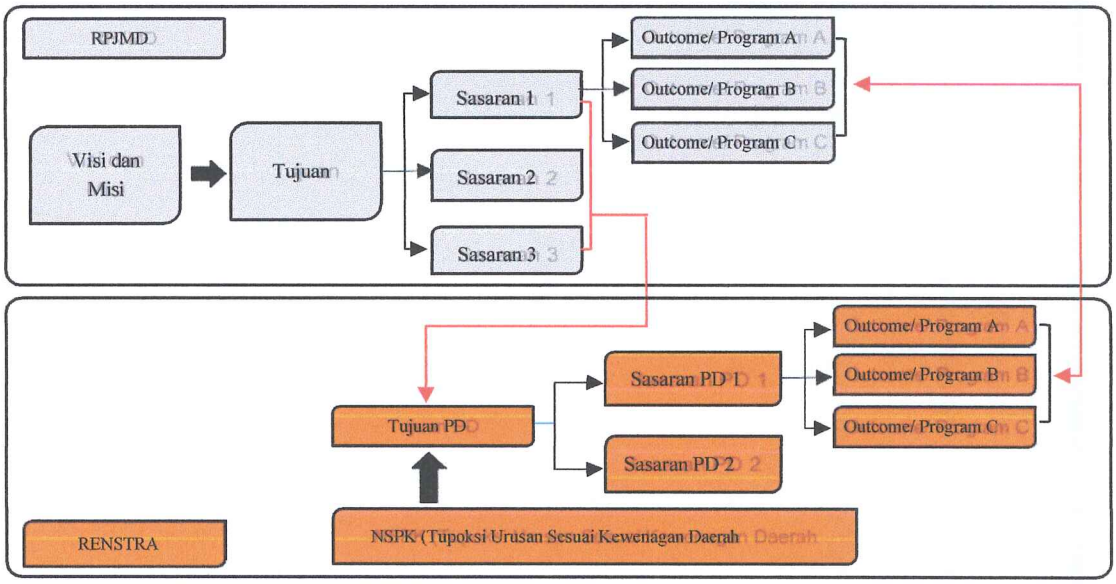
Tabel 2.3
Keterkaitan Antara RPJMD dan Renstra Dalam Perumusan Tujuan dan Sasaran Bappeda Provinsi Kepulauan Riau

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN RPJMD	RUMUSAN	INDIKATOR
Visi RPJMD 2025-2029	"Kepulauan Riau Maju, Makmur, dan Merata"	-
Misi Ke 4	Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis, terbuka, berbasis teknologi informasi dan berorientasi pelayanan.	-
Tujuan Daerah Ke 1	Mewujudkan tata Kelola pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang berbasis digital	Indeks Reformasi Birokrasi
Sasaran Daerah ke 2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan, Kapasitas Keuangan Daerah dan Kualitas Pengawasan serta Daya Saing Daerah	Predikat SAKIP
Tujuan Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dan Daya Saing Daerah	Predikat SAKIP
		Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)
Sasaran 1 Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Melalui Penerapan Manajemen Risiko	SAKIP Daerah komponen Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja
		Indeks Manajemen Risiko (MRI)
Sasaran 2 Perangkat Daerah	Terwujudnya Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah yang Kolaboratif dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Inovasi Daerah (IID)

Mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan yang memperlihatkan keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan Rencana Strategis perangkat daerah, Bappeda Provinsi Kepulauan Riau memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029. Kontribusi Bappeda diwujudkan melalui perumusan kebijakan, pelaksanaan program, serta fasilitasi perencanaan dan pengembangan yang sejalan dengan arah pembangunan daerah secara menyeluruh.

Gambar 2.1

Kontribusi Bappeda Provinsi Kepuluan Riau Terhadap Pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah



Dengan mengacu pada rumusan tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra, serta indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka dirumuskan pula target capaian kinerja yang terukur untuk masing-masing tujuan dan sasaran. Target tersebut disusun sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda Provinsi Kepulauan Riau selama periode 2025–2029, sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.4

Target Capaian Kinerja Indikator Tujuan dan Sasaran Renstra Bappeda Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dan Daya Saing Daerah	-	Predikat SAKIP (Predikat)	BB	BB	BB	BB	BB	A	A
	-	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) (Indeks)	3,40	3,40	3,48	3,56	3,64	3,72	3,80
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengukuran Kinerja Melalui Penerapan Manajemen Risiko	SAKIP Daerah komponen Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja (Nilai)	45,93	46,18	46,43	46,68	46,93	47,18	47,43
		Indeks Manajemen Risiko (MRI) (Indeks)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
	Terwujudnya Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah yang Kolaboratif dalam Mendukung Perencanaan Pembangunan	Indeks Inovasi Daerah (IID) (Indeks)	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif

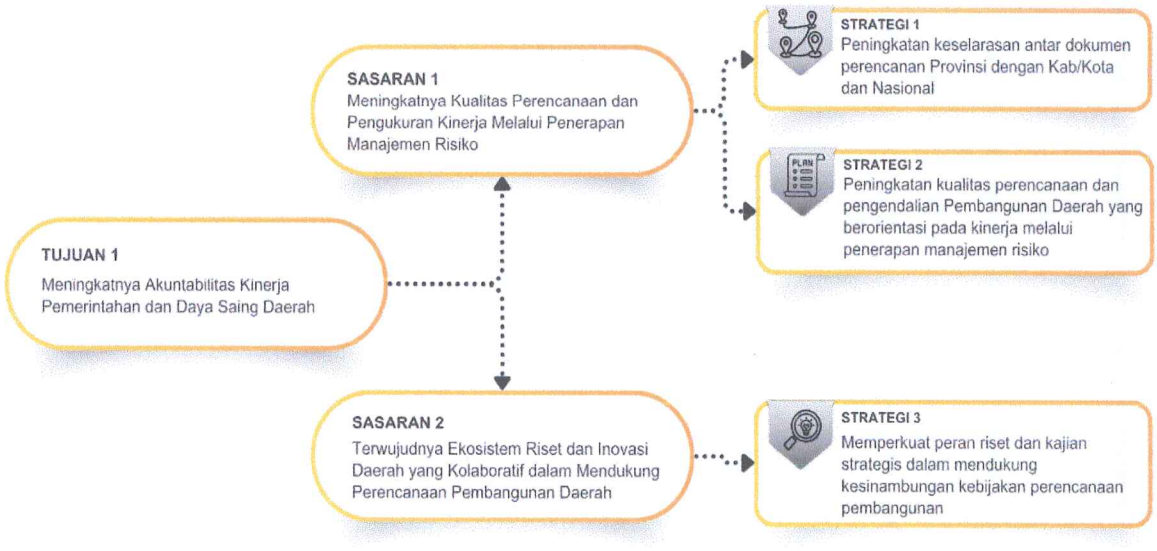
2. Strategi Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis

Sejalan dengan pendekatan perencanaan pembangunan yang mengedepankan keterpaduan antara dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah, Bappeda Provinsi Kepulauan Riau memiliki posisi strategis dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025–2029. Peran tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah, termasuk dalam penguatan kualitas perencanaan pembangunan, pengelolaan data dan informasi pembangunan, fasilitasi kebijakan berbasis riset, serta penyusunan inovasi kebijakan yang berorientasi pada peningkatan efektivitas dan efisiensi pembangunan daerah secara menyeluruh.

Berdasarkan kerangka tersebut, berikut dirumuskan Strategi Bappeda Provinsi Kepulauan Riau untuk periode perencanaan tahun 2025– 2029:

Gambar 2.2

Strategi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2026



Tabel 2.5

Penahapan Renstra Bappeda Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2025-2029

TAHAP	TAHUN	FOKUS TAHAPAN
Tahap 1	2026	Penataan awal sistem perencanaan pembangunan daerah yang dan berbasis kebutuhan riset
Tahap 2	2027	Konsolidasi mekanisme perencanaan berbasis kinerja yang didukung penguatan kolaborasi litbang
Tahap 3	2028	Akselerasi integrasi hasil litbang ke dalam dokumen perencanaan tematik dan sektoral
Tahap 4	2029	Optimalisasi pengendalian dan evaluasi pembangunan berbasis data, hasil riset, dan sistem inovasi daerah
Tahap 5	2030	Konsolidasi keberlanjutan sistem perencanaan dan penguatan kelembagaan litbang secara terpadu

3. Arah Kebijakan Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis

Dalam rangka mewujudkan peran strategisnya sebagai institusi yang mengoordinasikan perencanaan, penelitian, dan pengembangan pembangunan daerah, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau menetapkan arah kebijakan yang sejalan dengan visi, misi, serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. Arah kebijakan ini disusun tidak hanya sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan, tetapi juga sebagai upaya operasionalisasi berbagai norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang relevan. Dalam rangka mewujudkan peran strategisnya sebagai institusi yang mengoordinasikan perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah Provinsi Kepulauan Riau menetapkan arah kebijakan yang sejalan dengan visi, misi, serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah,

sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. Arah kebijakan ini disusun tidak hanya sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan, tetapi juga sebagai upaya operasionalisasi berbagai norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang relevan.

Tabel 2.6

Arah Kebijakan Renstra Bappeda Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029

OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA BAPPEDA
Penerapan Norma dan Standar Perencanaan Kolaboratif Pemerintah Daerah	Memantapkan sikronisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pelakasanaan rencana pembangunan daerah	Mengembangkan mekanisme penyelarasan kebijakan pembangunan antar level Pemerintahan dan antar sektor secara dinamis
Penyesuaian terhadap RPJPN 2025–2045 dan RPJMD Provinsi		Mengarahkan perencanaan pembangunan daerah untuk mendukung sasaran pembangunan jangka panjang secara konsisten dan berkelanjutan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan		Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang berbasis data, riset, dan berorientasi kinerja

OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA BAPPEDA
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah		
Permen PANRB tentang Sistem Manajemen Risiko dalam Tata Kelola Pemerintahan		Implementasi Manajemen Risiko dalam siklus perencanaan serta penguatan fungsi monitoring dan evaluasi pembangunan daerah
Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan integrasi sistem informasi pembangunan		Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi perencanaan dan evaluasi pembangunan berbasis digital dan integratif
Perpres No. 38 Tahun 2023 tentang Sistem Inovasi Daerah (SIDa)		Peningkatan relevansi rekomendasi dan pemanfaatan hasil riset dalam perencanaan pembangunan daerah
Implementasi Permenristek/BRIN tentang penguatan ekosistem inovasi daerah		Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) untuk mendukung daya saing
Kebijakan Kemendikbudristek dan Bappenas tentang kolaborasi multipihak dalam litbang		Penguatan kolaborasi dan jejaring riset lintas sektor
Permen PANRB dan regulasi Sumber Daya Manusia Litbang		Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM kelitbangan

C. Program dan Kegiatan

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Kepulauan Riau TA. 2025

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	**27.709.605.534,93**	**27.430.596.487,00**
PERENCANAAN	**27.709.605.534,93**	**27.430.596.487,00**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**24.589.827.003,93**	**24.378.274.522,00**
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**154.751.300,00**	**153.689.109,00**
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	154.751.300,00	153.689.109,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**21.572.701.259,00**	**21.409.292.787,00**
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	21.019.501.259,00	20.866.488.787,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	553.200.000,00	542.804.000,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**27.100.000,00**	**26.600.000,00**
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	27.100.000,00	26.600.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**812.598.922,00**	**794.497.176,00**
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.278.711,00	10.036.953,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.499.596,00	15.162.600,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	124.171.273,00	122.435.012,00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	124.197.502,00	123.952.040,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	44.950.000,00	39.980.000,00
Fasilitasi Kunjungan Tamu	59.237.840,00	50.746.673,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	434.264.000,00	432.183.898,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**64.582.771,83**	**63.825.000,00**
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	64.582.771,83	63.825.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**1.337.515.029,10**	**1.320.479.494,00**
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.000.000,00	12.000.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.000.000,00	64.980.680,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	194.000.000,00	189.800.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.061.515.029,10	1.053.698.814,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**620.577.722,00**	**609.890.956,00**

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	95.757.900,00	94.444.866,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	325.975.822,00	317.615.230,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.550.000,00	31.984.650,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	166.294.000,00	165.846.210,00
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	**2.176.054.010,00**	**2.133.795.679,00**
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	**1.772.456.950,00**	**1.735.405.725,00**
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	114.172.500,00	112.650.533,00
Pelaksanaan Konsultasi Publik	54.793.900,00	53.558.000,00
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	123.712.900,00	122.202.500,00
Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	327.946.000,00	318.802.983,00
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	1.151.831.650,00	1.128.191.709,00
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**12.500.000,00**	**12.176.325,00**
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	12.500.000,00	12.176.325,00
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**391.097.060,00**	**386.213.629,00**
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	226.767.460,00	223.217.009,00
Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	164.329.600,00	162.996.620,00
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	**943.724.521,00**	**918.526.286,00**
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	**359.596.731,00**	**339.555.577,00**
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	57.727.400,00	56.607.800,00
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	15.279.400,00	14.018.500,00
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan	286.589.931,00	268.929.277,00

Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	**302.781.190,00**	**300.957.484,00**
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	208.564.030,00	208.370.193,00
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi PenyusunanDokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	55.937.100,00	55.314.504,00
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	38.280.060,00	37.272.787,00
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**281.346.600,00**	**278.013.225,00**
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	80.733.200,00	79.666.550,00
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	41.298.600,00	40.593.150,00
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	51.837.500,00	51.116.250,00
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	107.477.300,00	106.637.275,00
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	**140.053.042,07**	**129.083.433,00**
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	**140.053.042,07**	**129.083.433,00**
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	**79.187.682,07**	**76.407.998,00**
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	32.515.230,00	31.433.500,00
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	46.672.452,07	44.974.498,00
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	**27.195.730,00**	**20.264.725,00**
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	27.195.730,00	20.264.725,00
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	**33.669.630,00**	**32.410.710,00**
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	33.669.630,00	32.410.710,00

BAB 3

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA

KEUANGAN TAHUN 2025

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2025

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN TAHUN 2025

A. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun anggaran 2025

Ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan mencerminkan keberhasilan dalam pencapaian kinerja keuangan dan ketaatan atas pelaksanaan anggaran Tahun 2025 dengan membandingkan anggaran dan realisasinya.

1. Pencapaian Target Belanja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

   Pencapaian target belanja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan menurut klasifikasi jenis belanja untuk tahun anggaran 2025, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1. Pencapaian target belanja

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
BELANJA	**27.849.658.577,00**	**27.559.679.920,00**	**98,96**
Belanja Operasi	**27.785.553.577,00**	**27.495.854.920,00**	**98,96**
Belanja pegawai	21.019.501.259,00	20.866.488.787,00	99,27
Belanja barang dan jasa	6.766.052.318,00	6.629.366.133,00	97,98
Belanja Modal	**64.105.000,00**	**63.825.000,00**	**99,56**
Belanja tanah	0,00	0,00	0,00
Belanja peralatan dan mesin	**64.105.000,00**	**63.825.000,00**	**99,56**
Belanja bangunan dan gedung	00,00	00,00	00,00
Belanja jalan, irigasi dan jaringan	00,00	00,00	00,00
Belanja aset tetap lainnya	00,00	00,00	00,00
Belanja tak terduga	00,00	00,00	00,00

Berdasarkan pencapaian kinerja belanja daerah berdasarkan jenis belanja, seperti dalam tabel di atas, menunjukan daya serap anggaran belanja yang

optimal. Dari anggaran belanja yang disediakan Tahun 2025 sebesar Rp 27.849.658.577,00 terserap sebesar Rp 27.559.679.920,00 atau 98,96%.

B. Hambatan dan Kendala yang Dijumpai Dalam Pencapaian Target Realisasi Anggaran yang Telah Ditetapkan.

Secara umum hambatan dan kendala dalam pencapaian target realisasi yang telah ditetapkan tidak dijumpai karena serapan anggaran tahun 2025 sudah optimal yaitu sebesar 98,96 %

BAB 4

KEBIJAKAN AKUNTANSI

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2025

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

A. Entitas Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan merupakan entitas akuntansi pada Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

B. Asumsi Dasar Laporan Keuangan

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

a. Asumsi kemandirian entitas;
b. Asumsi kesinambungan entitas; dan
c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement).

C. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Basis akuntansi yang di gunakan untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2025 adalah basis kas yang dimodifikasi menuju Akrual Base (Cash base modified toward acrual base):

1. Basis Kas untuk pengakuan pengukuran Laporan Realisasi Anggaran untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
2. Basis akrual untuk pengakuan pengukuran dalam pos-pos Neraca, untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana;
3. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan di akui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas di keluarkan dari kas daerah. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak mengakui adanya laba, melainkan dengan istilah sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan, dan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan;

4. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan di catat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau di bayar oleh kas daerah;

D. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

1. Basis Pengukuran Pos-pos Laporan Keuangan.

   Pengukuran adalah suatu proses menetapkan besarnya suatu transaksi dengan menggunakan nilai uang, sebagai dasar pencatatan transaksi tersebut. Adapun basis pengukuran dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, adalah sebagai berikut:

   a. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan, menggunakan basis historis atau nilai perolehan;
   b. Aset di catat sebesar nilai pengeluaran kas atau nilai wajar dari imbalan yang di berikan untuk memperoleh aset tersebut;
   c. Kewajiban di catat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban, atau nilai sekarang dari jumlah kas yang di harapkan akan di bayarkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut;
   d. Pengukuran pos-pos Laporan Keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing harus di konversi terlebih dahulu dengan kurs tengah Bank Indonesia, dan di nyatakan dalam mata uang rupiah.

2. Kesesuaian Kebijakan Akuntansi Yang Diterapkan Dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

   Laporan Keuangan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun anggaran 2025, telah disusun dan di sajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, oleh karena itu angka - angka yang disajikan dibuat berdasarkan catatan dan dokumen pendukung yang memadai, penerapan prinsip - prinsip pengendalian intern transaksi keuangan, pengklasifikasian, pengukuran dan pengungkapan, serta pengungkapan lainnya yang dipandang perlu, untuk dapat menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Wajar.

E. Kebijakan Akuntansi Pendapatan Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Kebijakan akuntansi yang terkait dengan pendapatan yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA diakui pada saat :

a. Diterima pada Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau
b. Diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD
c. Diterima entitas lain di luar Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atas nama Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Pendapatan-LO diakui pada saat :

a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*), yaitu:
    1) Timbulnya hak untuk menagih pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
    2) Timbulnya hak untuk menagih imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang- undangan.
b. Adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, yaitu:
    1) Pada saat diterima pembayaran secara tunai (*realized*); atau
    2) Pada saat sumber daya ekonomi masih berupa piutang (*realizable*).

F. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Kebijakan akuntansi atas belanja daerah yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Belanja diakui pada saat:

a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk seluruh transaksi di SKPD dan SKPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD.
b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.
c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja dan akun terkait pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya setelah Laporan Keuangan Audited terbit, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan pada kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis Lain-lain PAD Yang Sah–LRA.

G. Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan diakui pada saat:

a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal;
b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan pada akun konstruksi dalam pengerjaan, tidak diakui sebagai persediaan.

Persediaan dalam kondisi sudah tidak layak pakai/usang/rusak/sejenisnya berdasarkan hasil verifikasi/pengecekan/inventarisasi yang dituangkan dalam Berita Acara *stock opname*, disajikan sebagai beban persediaan dan dilaporkan dalam laporan operasional serta diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Jika ada hasil penjualan atas persediaan yang telah usang atau rusak diakui sebagai Lain-lain PAD yang Sah-LRA dan Lain-lain PAD yang Sah-LO. Pengakuan Beban Persediaan Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional.

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*). Pencatatan persediaan dilakukan dengan dua metode, yaitu:

a. Metode Perpetual, untuk jenis persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan. Dengan metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-update. Dalam hal pencatatan secara perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

   SKPD yang menggunakan metode perpetual, melakukan pencocokan dengan perhitungan fisik (*stock opname*). Apabila jumlah unit persediaan antara metode perpetual tidak sama dengan hasil perhitungan fisik maka diungggulkan pelaporan atas persediaan berdasarkan hasil perhitungan fisik (*stock opname*). Perbedaan jumlah unit persediaan dan sebab perbedaan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Metode Periodik, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK). Dengan metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak meng-update jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan *stock opname* pada akhir periode. Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan

dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

Beban persediaan diakui pada saat setiap pembelian persediaan. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional.

H. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.

Apabila Aset Tetap berasal dari pembelian/penggadaan (APBD), maka pengakuan aset tersebut diakui pada saat telah ada berita acara serah terima atau dokumen lain yang dipersamakan.

Apabila Aset Tetap berasal dari pihak ketiga (lembaga/pemerintah lainnya) aset diakui pada saat ada berita acara penyerahan aset dan adanya berita acara pemeriksaan fisik oleh tim pemeriksa aset.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi semua kriteria sebagai berikut:

a. Berwujud;
b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
e. Tidak dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga;

f. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
g. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan

Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

I. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

a. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
b. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
c. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui. Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban dapat timbul dari:

a. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*).
b. Transaksi tanpa Pertukaran (non-exchange transactions).
c. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (government-related events).
d. Kejadian yang diakui Pemerintah (government-acknowledge events).

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan.

Dalam kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam kejadian yang diakui Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kewajiban diakui ketika Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

BAB 5

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2025

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

1. Pendapatan-LRA

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tidak memiliki anggaran pendapatan/nihil atau bukan merupakan OPD penghasil.

2. Belanja

Anggaran dan realisasi belanja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2025, berdasarkan klasifikasi belanja adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1 Anggaran dan Realisasi Belanja

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
BELANJA	**27.849.658.577,00**	**27.559.679.920,00**	**98,96**
Belanja Operasi	**27.785.553.577,00**	**27.495.854.920,00**	**98,96**
Belanja Pegawai	21.019.501.259,00	20.866.488.787,00	99,27
Belanja Barang dan Jasa	6.766.052.318,00	6.629.366.133,00	97,98
Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal	**64.105.000,00**	**63.825.000,00**	**99,56**
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.105.000,00	63.825.000,00	99,56
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jalan, irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00

1) Belanja Operasi

Realisasi Belanja operasi Tahun 2025 sebesar Rp 27.495.854.920,00 atau 98,96 % dari anggaran belanja operasi yang disediakan sebesar Rp 27.785.553.577,00. Penjelasan atas realisasi Belanja Operasi Tahun 2025 sebagai berikut :

a) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025 sebesar Rp 20.866.488.787,00 atau 99,27% dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 21.019.501.259,00. Sesuai dengan konversi akun-akun, maka Belanja Pegawai terdiri atas Kelompok Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Belanja Pegawai yang termasuk dalam Kelompok Belanja Tidak Langsung, terdiri Objek Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dan Tambahan Penghasilan ASN.

Tabel 5.2 Rincian Belanja Pegawai

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	7.107.406.956,00	7.016.641.802,00	98,72	6.011.921.776,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	13.912.094.303,00	13.849.846.985,00	99,55	13.962.471.951,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	0,00

b) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 sebesar Rp 6.629.366.133,00 atau 97,98 % dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 6.766.052.318,00. Belanja Barang dan Jasa termasuk dalam Kelompok Belanja Langsung.

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja barang dan jasa ini mencakup belanja barang pakai habis, jasa kantor, iuran jaminan / asuransi, sewa peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan, jasa konsultansi non konstruksi, pendidikan dan pelatihan, pemeliharaan peralatan dan mesin, pemeliharaan gedung dan bangunan, perjalanan dinas dalam negeri.

Tabel 5.3 Rincian Belanja Barang dan Jasa

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Barang	2.003.907.868,90	1.937.303.348,00	96,68	3.488.140.304,00
Belanja Jasa	3.028.550.029,10	2.976.146.370,00	98,27	4.834.494.659,00
Belanja Pemeliharaan	351.454.000,00	349.580.580,00	99,47	505.240.450,00
Belanja Perjalanan Dinas	1.382.140.420,00	1.366.335.835,00	98,86	3.393.566.881,00

2) Belanja Modal

Realisasi Belanja modal Tahun 2025 sebesar Rp 63.825.000,00 atau 99,56 % dari anggaran belanja modal yang disediakan sebesar Rp 64.105.000,00. Penjelasan atas realisasi Belanja Modal Tahun 2025 sebagai berikut :

a) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian dan biaya instalasi serta

biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2025 sebesar Rp 63.825.000,00 atau 99,56 % dari anggaran belanja peralatan dan mesin yang disediakan sebesar Rp 64.105.000,00.

b) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap lainnya sampai siap pakai.

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 sebesar Rp 0,00 atau 0,00% dari anggaran Belanja Aset Tetap Lainnya yang disediakan sebesar Rp Rp 0,00.

Tabel 5.4 Rincian Belanja Modal

URAIAN	ANGGARAN (Rp) 2025	REALISASI (Rp) 2025	(%)	REALISASI (Rp) 2024
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.105.000,00	63.825.000,00	99,56	521.297.800
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00

B. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Posisi keuangan dalam Neraca Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025 secara umum sebagai berikut:

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Aset	2.190.588.967,22	2.155.350.756,33
Kewajiban	0,00	0,00
Ekuitas Dana	2.190.588.967,22	2.155.350.756,33

I. ASET	**31 Desember 2025**	**31 Desember 2024**
	Rp. 2.190.588.967,22	**Rp. 2.155.350.756,33**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah, sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi dan atau sosial di masa yang akan datang diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah ataupun masyarakat, serta dapat diukur dengan andal dalam satuan mata uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumberdaya yang dapat dipelihara, karena alasan sejarah dan budaya.

Aset Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 2.190.588.967,22 atau mengalami kenaikan sebesar Rp. 35.238.210,89 dibandingkan aset per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp. 2.155.350.756,33.

Rincian aset Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Aset Lancar	3.333.333,33	3.194.444,44
Aset Tetap	2.187.255.633,89	2.145.420.633,89
Aset Lainnya	0,00	6.735.678,00
Jumlah	**2.190.588.967,22**	**2.155.350.756,33**

a. Aset Lancar	**31 Desember 2025**	**31 Desember 2024**
	Rp. 3.333.333,33	**Rp. 3.194.444,44**

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, persediaan dan biaya dibayar dimuka. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan. Biaya dibayar dimuka merupakan pembayaran diawal untuk layanan atau barang yang akan dinikmati di masa depan, antara lain sewa dibayar dimuka.

Nilai Aset lancar Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp 3.333.333,33 dengan rincian sebagai berikut :

1)	**Beban dibayar di muka**	**31 Desember 2025**	**31 Desember 2024**
		Rp. 3.333.333,33	**Rp. 3.194.444,44**

Beban dibayar di muka adalah pengeluaran yang dibayar sebelum terjadi tetapi belum dicatat sebagai beban, merupakan biaya sewa kantor dibayar di muka.

2)	**Persediaan**	**31 Desember 2025**	**31 Desember 2024**
		Rp. 0,00	**Rp. 0,00**

b.	**Aset Tetap**	**31 Desember 2025**	**31 Desember 2024**
		Rp. 2.187.255.633,89	**Rp. 2.145.420.633,89**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Rincian Aset Tetap Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

Tabel 5.5 Rincian Aset Tetap

No	Aset Tetap	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1	Tanah	0,00	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	14.171.269.752,50	14.129.434.752,50	41.835.000,00
3	Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	44.858.000,00	44.858.000,00	0,00
5	Aset Tetap Lainnya	24.500.000,00	24.500.000,00	0,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
7	Akumulasi Penyusutan	(12.053.372.118,61)	(12.053.372.118,61)	0,00
	Jumlah	**2.187.255.633,89**	**2.145.420.633,89**	**41.835.000,00**

Pelasan lebih lanjut atas nilai aset tetap dengan Tahun 2025 akan dijelaskan pada masing-masing jenis aset berikut.

1)	**Peralatan dan Mesin**	**31 Desember 2025**	**31 Desember 2024**
		Rp 14.171.269.752,50	**Rp 14.129.434.752,50**

Nilai aset peralatan dan mesin Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp 14.171.269.752,50 naik sebesar Rp. 41.835.000,00 jika dibandingkan nilai aset peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp. 14.129.434.752,50

2)	**Jalan, Irigasi dan Jaringan**	**31 Desember 2025**	**31 Desember 2024**
		Rp Rp 44,858,000,00	**Rp 44,858,000,00**

Nilai aset jalan, irigasi dan jaringan Badan Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp.44,858,000,00 sama dibandingkan nilai aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024.

3)	**Aset Tetap Lainnya**	**31 Desember 2025**	**31 Desember 2024**
		Rp. 24.500.000,00	**Rp. 24.500.000,00**

Nilai aset tetap lainnya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 24.500.000,00 sama jika dibandingkan nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 2024.

4)	**Akumulasi Penyusutan**	**31 Desember 2025**	**31 Desember 2024**
		Rp. 12.053.372.118,61	**Rp 12.053.372.118,61**

Akumulasi Penyusutan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 12.053.372.118,61 sama jika dibandingkan nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 2024.

c.	**Aset Lainnya**	**31 Desember 2025**	**31 Desember 2024**
		Rp. 0,00	**Rp. 6.735.678,00**

Nilai aset lainnya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,00 turun sebesar Rp. 6.735.678,00,00 jika dibandingkan nilai aset lainnya per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar Rp. 6.735.678,00

II.	**KEWAJIBAN**	**31 Desember 2025**	**31 Desember 2024**
		Rp. 0,00	**Rp. 0,00**

Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

a. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
b. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
c. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Rincian Kewajiban Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemda Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut

Tabel 5.6 Rincian Kewajiban

No	Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	Bertambah/ (Berkurang) (Rp)
1	Kewajiban Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00
2	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00	0,00
3	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00	0.00
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00	0.00
	Jumlah	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
III.	**EKUITAS**	**Rp. 2.190.588.967,22**	**Rp. 2.155.350.756,33**

Ekuitas adalah kekayaan bersih Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau, yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Ekuitas Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp. **2.190.588.967,22** yang terdiri dari :

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
a.	Ekuitas	Rp.(25.362.355.274,78)	Rp.(31.171.126.264,67)

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 2.133.360.756,33 terdiri dari:

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
1.	Ekuitas	Rp. 2.133.360.756,33	Rp. 8.032.823.035,22

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
2.	Surplus/ Defisit-LO	Rp. (27.495.716.031,11)	Rp. (39.203.949.299,89)

		31 Desember 2025	31 Desember 2024
b.	Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan	Rp. 27.552.944.242,00	Rp. 33.326.477.021,00

C. LAPORAN OPERASIONAL

1. Pendapatan-LO

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tidak memiliki anggaran Pendapatan-Lo/ nihil atau bukan merupakan OPD penghasil.

2. Beban – LO

Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik. Beban

Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa dengan realisasi tahun 2025 sebesar Rp 27.495.716.031,11 dengan rincian :

Tabel 5.6 Rincian Beban

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
BEBAN	**27.495.716.031,11**	**33.664.808.527,89**
Beban Operasi	**27.495.716.031,11**	**32.591.727.045,12**
Beban Pegawai	20.866.488.787,00	20.579.642.677,00
Beban Barang dan Jasa	6.629.227.244,11	12.012.084.368,12
Beban Penyusutan dan Amortisasi	**00,00**	**1.073.081.482,77**

Rincian Beban Operasi adalah sebagai berikut :

a) Beban Pegawai

Pada tahun 2025 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau mencatat realisasi Beban Pegawai sebesar Rp 20.866.488.787,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.7 Rincian Beban Pegawai

Uraian	Nilai
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	7.016.641.802,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	13.849.846.985,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00

b) Beban Barang dan Jasa

Pada tahun 2025 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Riau mencatat realisasi Beban Barang dan Jasa sebesar Rp. 6.629.227.244,11 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.8 Rincian Beban Barang dan Jasa

Uraian	Nilai (Rp.)
Beban Barang	1.937.303.348,00
Beban Jasa	2.976.007.481,11
Beban Pemeliharaan	349.580.580,00
Beban Perjalanan Dinas	1.366.335.835,00

D. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp 2.155.350.756,33 dan Ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp 2.190.588.967,22

Nilai Ekuitas	31 Desember 2025	1 Januari 2025
	Rp. 2.190.588.967,22	**Rp. 2.155.350.756,33**

BAB 6

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2025

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

A. Bentuk Hukum dan Domisili Entitas Akuntansi

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55)

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau beralamat di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau "Bandar Seri Kota Piring" Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Abdul Rahman (Gedung D Lt. II & III) Pulau Dompak Seri Darul Makmur, Tanjungpinang

B. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau adalah Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersifat nirlaba (tidak bertujuan mencari keuntungan), dengan kegiatan pokok adalah pemberian layanan kepada masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan rakyat di Provinsi Kepulauan Riau, dengan sasaran pembangunan yang terarah dan terintegrasi dalam Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau, sebagai amanat dalam mencapai visi dan misi Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

C. Pergantian Pengguna Anggaran.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 630 Tahun 2025 tanggal 23 Mei 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pengguna Anggaran Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.

BAB 7

PENUTUP

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2025

LAMPIRAN

BAB VII
P E N U T U P

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, dengan beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Total belanja yang terealisasi pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp. 27.559.679.920,00 atau 98,96% dari anggaran belanja yang direncanakan pada tahun 2025 sebesar Rp. 27.849.658.577,00.
2. Nilai aset yang dikuasai Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp 2.190.588.967,22.
3. Nilai kewajiban yang ditanggung Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 nihil.
4. Nilai Ekuitas dana yang dimiliki Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 2.190.588.967,22.

Demikian laporan Keuangan ini kami susun, agar dapat dipergunakan oleh semua pihak yang berkepentingan di Pemerintah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.